

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL EMPAT KORIDOR DI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2021

Titania Fanesa Setia Mevia

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Malang, Alamat Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur

* Corresponding author: titaniafanesa00@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 12/06/2023

Revised 20/08/2023

Accepted 29/08/2023

Available online 31/08/2023

Keyword: *Gross regional
domestic product (GRDP);
economic growth; regional
inequality; East Java*

JEL Classification:
H51, H52, H53, E24

Copyright (c) 2023
Mevia, T. F. S.

This is an open access article and
licensed under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstract

This study aims to determine the analysis economic growth and regional inequality in East Java 2016-2021. Inner data type This study uses secondary data. Whereas the research data used is data time series starting in 2016-2021, namely regarding Gross Regional Domestic Product (GRDP) data, GRDP per capita and population. economic growth for each corridor in East Java Province in 2016-2021 it can be seen that the highest growth occurs in the North South corridor and the lowest is in the North corridor. The results of a comparison of regional inequality for each corridor in East Java Province for 2016-2021 show that the highest regional inequality occurs in the North South corridor and the lowest is in the Southwest corridor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Jawa Timur Tahun 2016-2021. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan data penelitian yang digunakan adalah data time series mulai tahun 2016-2021 yaitu mengenai data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita dan jumlah penduduk. pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi di koridor Utara Selatan dan terendah yaitu pada koridor Utara. Adapun hasil perbandingan ketimpangan regional untuk masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa ketimpangan regional tertinggi terjadi di koridor Utara Selatan dan terendah yaitu pada koridor Barat Daya.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu yang panjang atau long term, dalam pembangunan tersebut terdapat berbagai kemajuan yang cukup pesat untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah, namun juga terdapat berbagai permasalahan yang sulit untuk diatasi, yaitu terdapat tingkat kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, strategi dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah di masa lampau yang telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (Lestari et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi menginformasikan sampai sejauh mana perkembangan dari aktivitas perekonomian yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu (Isnaini et al., 2023). Maka pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam suatu proses pertumbuhan baik negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai peran penting terhadap kesuksesan ekonomi nasional, karena apabila target perekonomian di daerah terpenuhi maka perekonomian nasional akan ikut meningkat sebab daerah merupakan dasar dari terbentuknya suatu negara.

Selanjutnya analisis mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan aspek yang umum terjadi, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya ketidak merataan pembangunan ekonomi yaitu 1) perbedaan kandungan sumber daya alam, 2) perbedaan kondisi geografis, 3) kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) alokasi dana pembangunan antar wilayah (Noviar, 2021). Selain itu masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya meliputi wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi melainkan juga antar Pulau Jawa dan luar Jawa. Berbagai program telah dikembangkan untuk mengurangi maupun menghilangkan ketimpangan antar daerah selama ini ternyata masih belum mencapai hasil yang memadai.

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrument untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan regional (Majidi, 2017) dalam (Marwoto & Manullang, 2019). Ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah maupun daerah dapat dianalisis dengan perhitungan Indeks Williamson (Berlianantiya, 2017). Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan penduduk suatu wilayah. Dengan garis besar, apabila angka indeks kesenjangan Williamson mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin rendah dan apabila angka indeks Williamson menunjukkan kesenjangan mendekati satu, maka menunjukkan kesenjangan semakin tinggi.

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari permasalahan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kota atau kabupaten yang ada di wilayah tersebut (Islami & Nugroho, 2018). Sehingga proses pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan diminimalisir tingkat

ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut kearah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan yang kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang bervariasi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan dikarenakan pelemahan nilai rupiah. Ada Penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional. Pertama, dari jurnal penelitian yang ditulis oleh (Rajab & Kamarudin, 2021) yang menunjukkan berdasarkan hasil olah data yang ada maka pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan bahwa tahun 2005-2020 mengalami fluktuatif atau naik turun hal ini terlihat dari hasil olah data dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 11,91% sedangkan tingkat terendah berada pada tahun 2020 yakni -2,42. Penelitian lainya dari (Kurniawan & Huda, 2020) dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. Hasil Tipologi Klassen, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar masuk dalam area Kuadran I, Kabupaten Gianyar masuk dalam area Kuadran III, dan 6 Kabupaten lainnya masuk dalam area Kuadran IV. Adapun penelitian (Patra, 2022) berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. (Meilani & Wuryandani, 2012) dengan judul Pola Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian (Umiyati, 2012), Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera mempunyai tingkat keragaman yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan setiap Propinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumberdaya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki oleh Propinsi tersebut.

Serta masih bergantungnya beberapa sektor industri terhadap bahan baku impor. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut jelas akan berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi dan akan menimbulkan faktor-faktor lain akan mengalami penurunan. Selain itu ketimpangan regional yang terjadi di Jawa Timur terjadi dimana pendapatan yang diterima oleh semua kalangan masyarakat tidak merata selain itu tingkat pembangunan di suatu daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kurang memanfaatkan adanya *property rights* pada daerah yang mempunyai sumber daya melimpah. Ketimpangan distribusi pendapatan telah menjadi persoalan lama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di negara

berkembang dan negara maju (Permana, 2016). Pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan dikarenakan ingin mengetahui seberapa besar perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah dan dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional empat koridor di Jawa Timur Tahun 2016-2021.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah melalui dokumentasi yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi data sekunder yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita dan jumlah penduduk Tahun 2016-2021. Datanya diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur. Variabel data terdiri dari :

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

2. Ketimpangan regional

Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sederhana:

$$g = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Bila pertumbuhan ekonomi (g) adalah negatip berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB₁) tahun pengamatan tertentu lebih kecil dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya (PDRB₀), sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi (g) adalah positif berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB₁) tahun pengamatan tertentu lebih besar dari Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya (PDRB₀). Pada dasarnya pendapatan regional tidak selalu meningkat setiap tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian yang terjadi, sebaliknya apabila pertumbuhan negatip berarti terjadi penurunan kinerja dan aktivitas perekonomian.

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau Kota yang terjadi di



Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks

ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997) dalam (Abdiriyanto & Cita, 2022):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita per Kota/ Kabupaten

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah di Jawa Timur

f_i = jumlah penduduk Kota/Kabupaten di Jawa Timur

n = jumlah penduduk seluruh Jawa Timur

Indeks Williamson berkisar antara 0 < IW < 1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai daerah provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota tertinggi yang ada di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I mencakup daerah Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, , dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan.

Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Blitar, Kab. Blitar. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep. Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi

Gambar 1 . Peta wilayah Propinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Hasil analisis pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

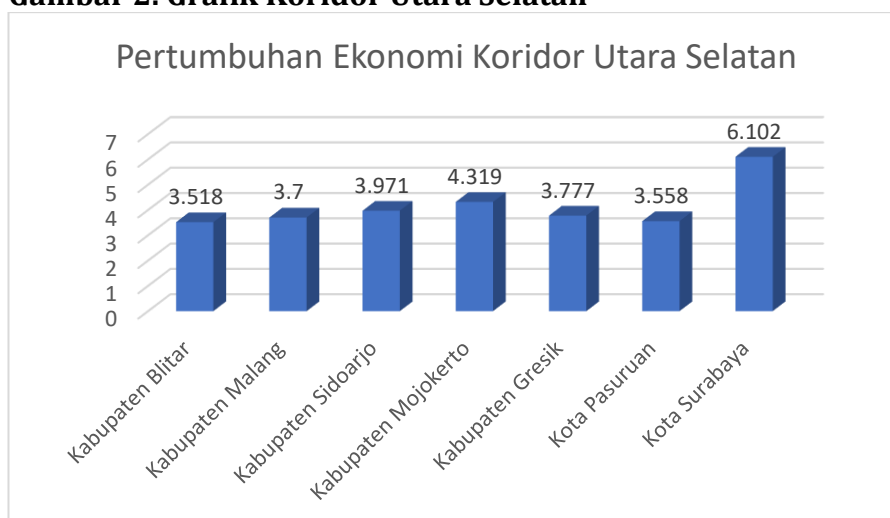
a. Koridor Utara Selatan

Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Utara Selatan yaitu terdiri dari lima kabupaten dan dua kota, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Utara Selatan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada Tabel 1. Pada tabel 1 dan gambar 2 menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa Kota Surabaya memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 6,09% dan Kabupaten Blitar memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,51%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya.

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi Koridor Utara Selatan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun						Rata- Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kabupaten Blitar	5,079	5,075	5,101	5,122	-2,29	3,025	3,518
Kabupaten Malang	5,296	5,428	5,553	5,493	2,682	3,116	3,700
Kabupaten Sidoarjo	5,505	5,805	6,009	5,99	3,692	4,209	3,971
Kabupaten Mojokerto	5,489	5,728	5,88	5,81	-1,11	4,117	4,319
Kabupaten Gresik	5,492	5,831	5,807	5,425	-3,68	3,792	3,777
Kota Pasuruan	5,466	5,47	5,536	5,561	4,327	3,645	3,558
Kota Surabaya	-24,8	49,69	6,194	6,087	4,854	4,295	6,102

Gambar 2. Grafik Koridor Utara Selatan



b. Koridor Barat Daya

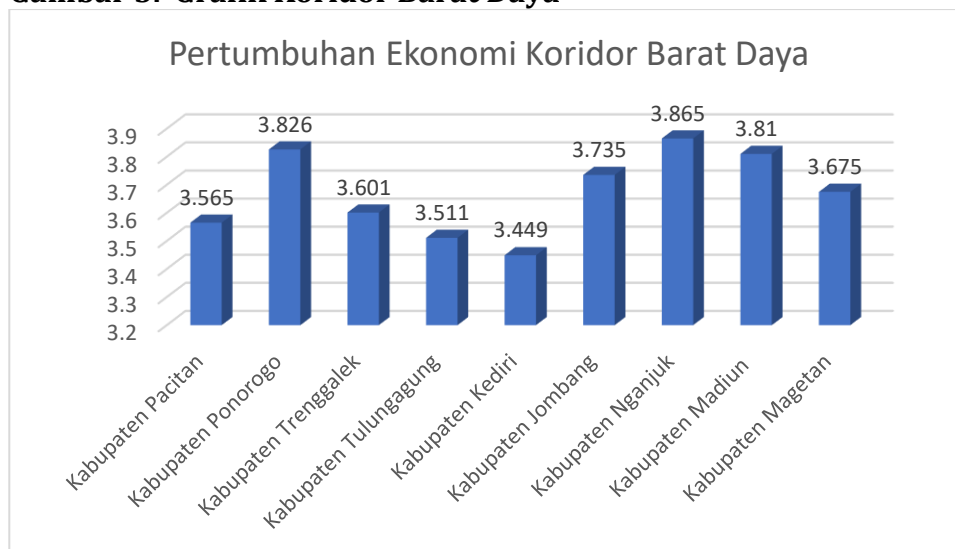
Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Barat Daya yaitu terdiri dari Sembilan kabupaten, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel 2. Pada tabel 3 dan gambar 4 menunjukkan bahwa diketahui bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 3,86% dan Kabupaten Kediri memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,44%.

Tabel 2. Pertumbuhan ekonomi Koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun						Rata- Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kabupaten Pacitan	5,213	4,982	5,47	5,0764	1,838	2,487	3,565
Kabupaten Ponorogo	5,286	5,102	5,271	5,0084	0,899	3,186	3,826
Kabupaten Trenggalek	4,998	5,019	5,026	5,0782	2,168	3,652	3,601
Kabupaten Tulungagung	5,016	5,08	5,207	5,3225	3,092	3,533	3,511
Kabupaten Kediri	5,016	4,896	5,068	5,0647	2,407	3,056	3,449
Kabupaten Jombang	5,395	5,363	5,292	5,1031	-1,98	3,239	3,735
Kabupaten Nganjuk	5,287	5,26	5,385	5,3582	1,714	3,615	3,865

Kabupaten					-		
Madiun	5,269	5,417	5,099	5,4209	1,688	3,344	3,810
Kabupaten					-		
Magetan	5,305	5,089	5,214	5,0378	1,636	3,042	3,675

Gambar 3. Grafik Koridor Barat Daya



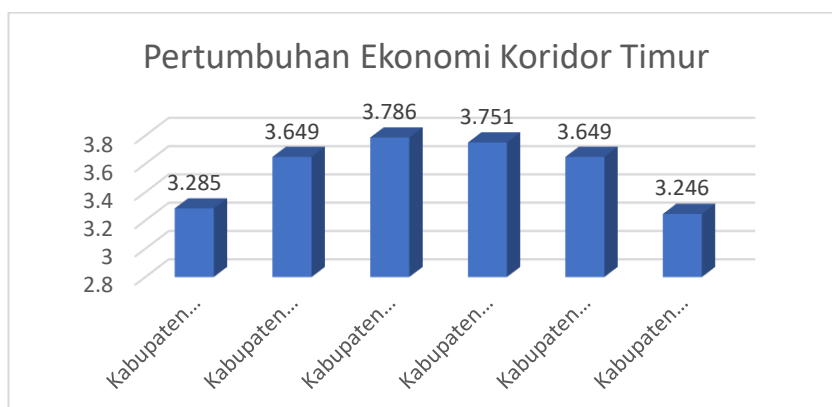
c. Koridor Timur

Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Timur yaitu terdiri dari enam kabupaten, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Timur di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan ekonomi Koridor Timur di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun						Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kabupaten Lumajang	4,702	5,051	4,999	4,606	-2,79	3,144	3,285
Kabupaten Jember	5,226	5,113	5,024	5,508	2,977	3,997	3,649
Kabupaten Banyuwangi	5,378	5,447	5,835	5,55	-3,58	4,083	3,786
Kabupaten Bondowoso	4,973	5,028	5,077	5,296	1,361	3,493	3,751
Kabupaten Situbondo	5	5,066	5,457	5,44	2,329	3,26	3,649
Kabupaten Probolinggo	4,768	4,459	4,465	4,562	2,125	3,346	3,246

Gambar 4. Tabel Grafik



Pada tabel 3 dan gambar 4 di atas menunjukkan bahwa diketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 3,78% dan Kabupaten Probolinggo memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,44%.

d. Koridor Utara

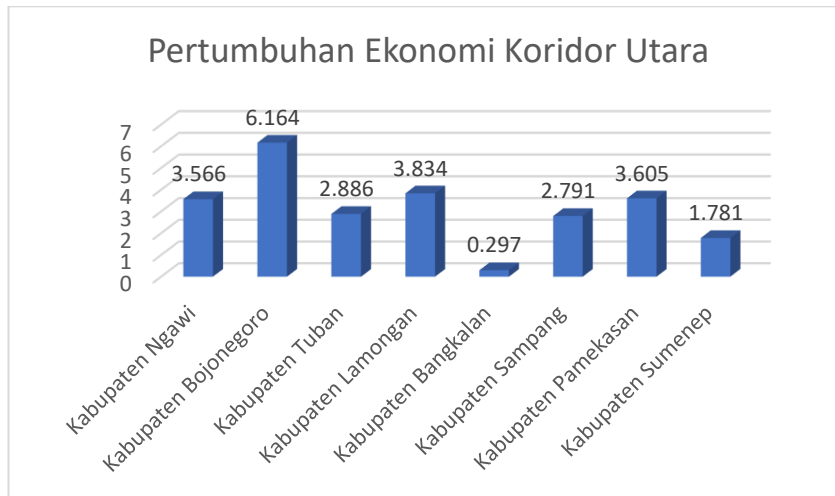
Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Utara yaitu terdiri dari delapan kabupaten, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Utara di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel 4. Pada tabel 4 dan gambar 5 menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 6,16% dan Kabupaten Bangkalan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 0,29%. Hasil perbandingan hasil analisis pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada Gambar Tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Koridor Utara di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun						Rata- Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kabupaten Ngawi	5,208	5,071	5,206	5,046	1,686	2,551	3,566
Kabupaten Bojonegoro	21,95	10,25	4,392	6,336	0,403	5,543	6,164
Kabupaten Tuban	4,901	4,979	5,148	5,138	5,845	2,997	2,886
Kabupaten Lamongan	5,856	5,5	5,444	5,428	2,647	3,425	3,834
Kabupaten Bangkalan	0,661	3,526	4,216	1,032	5,586	2,066	0,297
Kabupaten Sampang	6,167	4,693	4,11	1,847	0,294	0,221	2,791
Kabupaten Pamekasan	5,355	5,037	5,458	4,916	-2,54	3,405	3,605

Kabupaten							
Sumenep	2,58	2,859	3,632	0,139	1,133	2,611	1,781

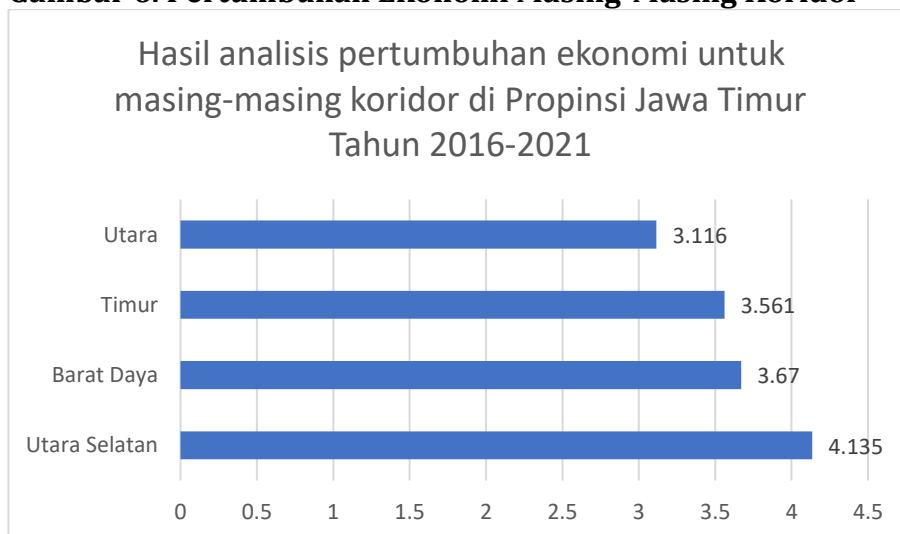
Gambar 5. Pertumbuhan Ekonomi Koridor Utara



Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing Koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

No.	Koridor	Rata-Rata Pertumbuhan
1.	Utara Selatan	4,135
2.	Barat Daya	3,67
3.	Timur	3,561
4.	Utara	3,116

Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing Koridor



Hasil perbandingan pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi di koridor Utara Selatan dan terendah yaitu pada koridor Utara.

1. Hasil ketimpangan regional empat koridor di Jawa Timur pada periode tahun 2015-2021

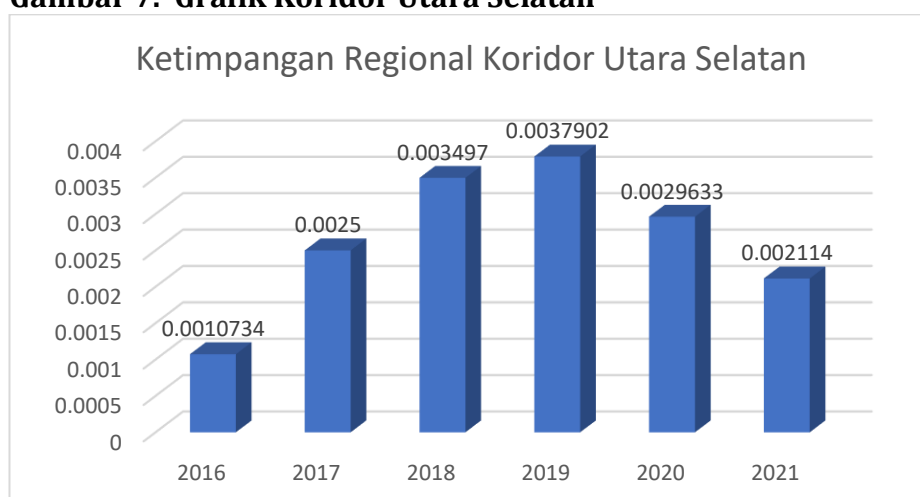
a. Koridor Utara Selatan

Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Utara Selatan yaitu terdiri dari lima kabupaten dan dua kota, hasil analisis ketimpangan regional empat koridor di Jawa Timur pada periode tahun 2015-2021 untuk masing-masing koridor Utara Selatan dapat disajikan pada gambar Tabel 6.

Tabel 6. Ketimpangan Regional Koridor Utara Selatan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Blitar	0,00023	0,00028	0,00017136	0,00016676	0,00028661	0,000299
Kabupaten Malang	0,000329	0,000401	0,000196094	0,000183718	0,00034905	0,000409
Kabupaten Sidoarjo	0,000680	0,000612	0,001002289	0,001115168	0,00093638	0,000527
Kabupaten Mojokerto	0,000083	0,000067	0,000178479	0,000209073	0,00011894	0,000034
Kabupaten Gresik	0,001089	0,000968	0,001457961	0,001584674	0,00110048	0,000688
Kota Pasuruan	0,000013	0,000016	0,000006678	0,000005872	0,00001889	0,000022
Kota Surabaya	0,00509	0,01526	0,02146902	0,023266506	0,01793294	0,012819
Rata-Rata	0,0010734	0,0025	0,003497	0,0037902	0,0029633	0,002114

Gambar 7. Grafik Koridor Utara Selatan



Pada Tabel 6 dan gambar 7 diatas menunjukkan Berdasarkan diketahui bahwa selama tahun 2016-2021 ketimpangan tertinggi yaitu terjadi pada

Tahun 2019 yaitu sebesar 0,0037902 dan terendah yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0010734.

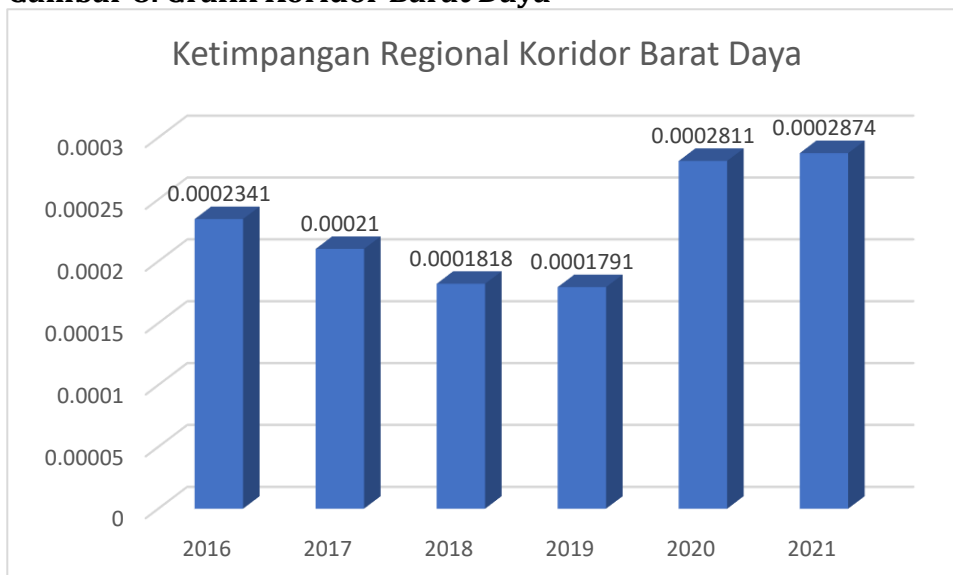
b. Koridor Barat Daya

Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Barat Daya yaitu terdiri dari Sembilan kabupaten, hasil analisis ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Ketimpangan Regional Koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	0,000142	0,000164	0,0001073	0,0001053	0,0001664	0,000171
Kabupaten Ponorogo	0,000301	0,000341	0,0002448	0,0002435	0,0003712	0,000371
Kabupaten Trenggalek	0,000202	0,000232	0,0001598	0,0001581	0,0002367	0,000236
Kabupaten Tulungagung	0,000130	0,000159	0,0000779	0,0000728	0,0001599	0,000176
Kabupaten Kediri	0,000442	0,000038	0,0003517	0,0003500	0,0005140	0,000513
Kabupaten Jombang	0,000240	0,000280	0,0001772	0,0001732	0,0002891	0,000311
Kabupaten Nganjuk	0,000326	0,000374	0,0002697	0,0002670	0,0003840	0,000387
Kabupaten Madiun	0,000180	0,000207	0,0001424	0,0001393	0,0002348	0,000241
Kabupaten Magetan	0,000144	0,000167	0,0001059	0,0001029	0,0001739	0,000181
Rata-Rata	0,0002341	0,00021	0,0001818	0,0001791	0,0002811	0,0002874

Gambar 8. Grafik Koridor Barat Daya



Pada table 7 dan gambar 8 diatas menunjukkan bahwa diketahui bahwa selama tahun 2016-2021 ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa ketimpangan

tertinggi yaitu terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,0002874 dan terendah yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0001791.

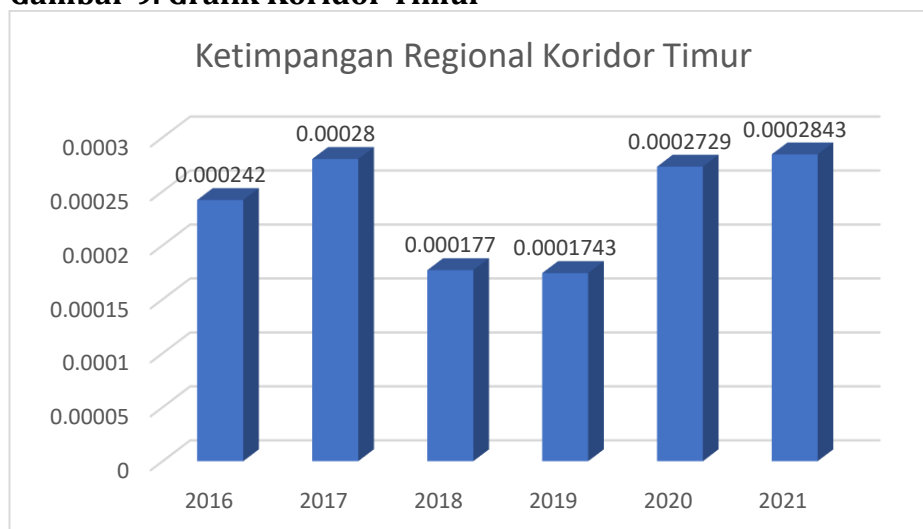
c. Koridor Timur

Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Timur yaitu terdiri dari enam kabupaten, hasil analisis ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Timur di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Ketimpangan Regional Koridor Timur di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Lumajang	0,000220	0,000257	0,0001591	0,0001572	0,0002847	0,000287
Kabupaten Jember	0,000496	0,000584	0,0003579	0,0003461	0,0005723	0,000597
Kabupaten Banyuwangi	0,000053	0,000073	0,0000079	0,0000042	0,0000709	0,000107
Kabupaten Bondowoso	0,000237	0,000273	0,0001926	0,0001918	0,0002460	0,000248
Kabupaten Situbondo	0,000171	0,000199	0,0001314	0,0001291	0,0001786	0,000184
Kabupaten Probolinggo	0,000275	0,000326	0,0002167	0,0002179	0,0002850	0,000283
Rata-rata	0,000242	0,00028	0,000177	0,0001743	0,0002729	0,0002843

Gambar 9. Grafik Koridor Timur



Pada table 8 dan gambar 9 diatas menunjukkan bahwa ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Timur di Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi yaitu terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,0002843 dan terendah yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0001743.

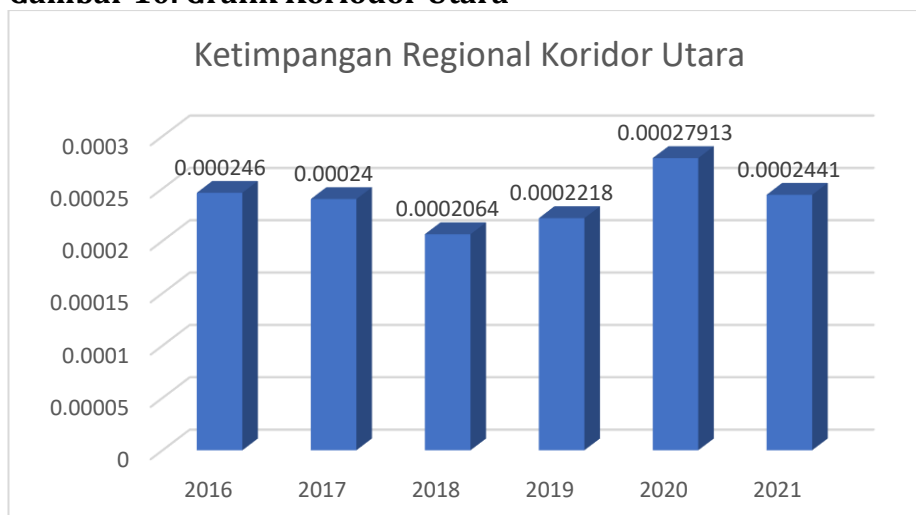
d. Koridor Utara

Kabupaten/ kota yang masuk dalam koridor Utara yaitu terdiri dari delapan kabupaten, hasil analisis ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Utara di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada table 9.

Tabel 9. Tabel Ketimpangan Regional Koridor Utara di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Ngawi	0,000281	0,000322	0,0002313	0,0002294	0,0003244	0,000320
Kabupaten Bojonegoro	0,000283	0,000120	0,0002889	0,0003528	0,0001829	0,000011
Kabupaten Tuban	0,000008	0,000008	0,0000028	0,0000053	0,0000094	0,000015
Kabupaten Lamongan	0,000215	0,000260	0,0001491	0,0001408	0,0003256	0,000349
Kabupaten Bangkalan	0,000335	0,000265	0,0001941	0,0002129	0,0003617	0,000297
Kabupaten Sampang	0,000328	0,000382	0,0003144	0,0003351	0,0003961	0,000381
Kabupaten Pamekasan	0,000349	0,000401	0,0003311	0,0003392	0,0003851	0,000370
Kabupaten Sumenep	0,000174	0,000220	0,0001401	0,0001592	0,0002479	0,000210
Rata-rata	0,000246	0,00024	0,0002064	0,0002218	0,00027913	0,0002441

Gambar 10. Grafik Koridor Utara



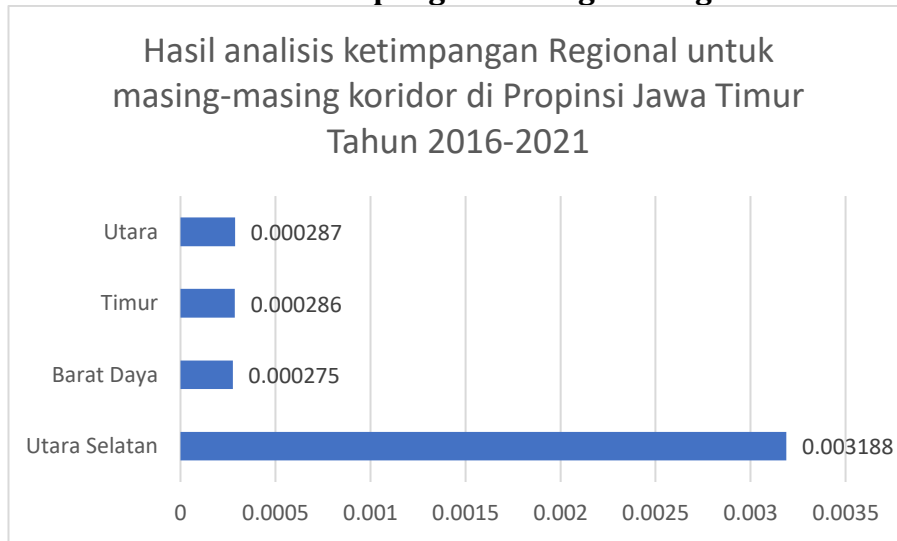
Pada table 9 dan gambar 10 diatas menunjukkan bahwa ketimpangan regional untuk masing-masing wilayah pada koridor Utara di Propinsi Jawa Timur.tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi yaitu terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 0,00027913 dan terendah yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0002218. Hasil perbandingan hasil analisis

ketimpangan regional untuk masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada gambar 9.

Tabel 10 Ketimpangan Regional Masing-Masing Koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

No.	Koridor	Ketimpangan Regional
1.	Utara Selatan	0,003188
2.	Utara	0,000287
3.	Timur	0,000286
4.	Barat Daya	0,000275

Gambar 11. Grafik Ketimpangan masing-masing Koridor



Hasil perbandingan ketimpangan regional untuk masing-masing koridor di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa ketimpangan regional tertinggi terjadi di koridor Utara Selatan dan terendah yaitu pada koridor Barat Daya.

Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Hasil analisis tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Utara Selatan di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa Kota Surabaya memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 6,09% dan Kabupaten Blitar memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,51%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik, dengan tumbuhnya ekonomi, maka Kota Surabaya tersebut semakin maju, dan ditandai oleh tingginya pendapatan masyarakat, rendahnya kriminalitas, tingginya pendidikan dan tingkat pengangguran yang rendah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 3,86% dan Kabupaten Kediri memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,44%. Tingginya

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Hasil analisis tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Timur di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 3,78% dan Kabupaten Probolinggo memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,44%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat.

Hasil analisis tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing koridor Utara di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016-2021 yaitu sebesar 6,16% dan Kabupaten Bangkalan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 0,29%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur dengan persentase pertumbuhannya sebesar 12 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro ini melebihi pertumbuhan ekonomi Jatim dengan jumlah pertumbuhan 6,5 persen dan nasional sebesar 6,17 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi Bojonegoro ditopang sektor pertambangan yang mencapai 20 persen, perdagangan, jasa, dan pertanian.

Menurut Boediono (1999) dalam (Fajri, 2016) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, Output perkapita dan jangka panjang. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.

Ketimpangan regional empat koridor di Jawa Timur pada periode tahun 2015-2021

Hasil analisis ketimpangan regional empat koridor di Jawa Timur pada periode tahun 2015-2021 dapat diketahui bahwa selama tahun 2016-2021 ketimpangan tertinggi yaitu terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 0,0037902 dan terendah yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0010734. Ketimpangan tertinggi tersebut dikarenakan permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan Sumber Daya Alam ataupun Sumber Daya Manusia serta infrastruktur tiap daerah.

Hasil analisis koridor ketimpangan regional Barat Daya yaitu terdiri dari Sembilan kabupaten, hasil analisis ketimpangan regional koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa selama tahun 2016-2021 ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Barat Daya di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi yaitu

terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,0002874 dan terendah yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0001791.

Hasil analisis ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Timur di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Timur di Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi yaitu terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,0002843 dan terendah yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0001743. Faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah di koridor Timur di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 yaitu, perbedaan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah yang berbeda-beda.

Hasil analisis ketimpangan regional untuk masing-masing koridor Utara di Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa ketimpangan regional untuk masing-masing wilayah pada koridor Utara di Propinsi Jawa Timur tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi yaitu terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 0,00027913 dan terendah yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0002218. Di antaranya ketidaksiapan menerima perubahan, kebijakan pembangunan yang kurang tepat, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif, dan terakhir adanya bias akibat globalisasi.

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*developed region*) dan daerah terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2012) dalam (Hadju et al., 2021).

KESIMPULAN

Hasil analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Jawa Timur Tahun 2016-2021 dapat diketahui bahwa untuk koridor Utara Selatan Kota Surabaya memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 6,09% dan Kabupaten Blitar memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,51%. Pada koridor Barat Daya Kabupaten Nganjuk memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 3,86% dan Kabupaten Kediri memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,44%. Selanjutnya untuk koridor Timur dapat diketahui Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,78% dan Kabupaten Probolinggo memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 3,44% dan koridor Utara Kabupaten Bojonegoro memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 6,16% dan Kabupaten Bangkalan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 0,29%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiriyanto, D., & Cita, F. P. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor di Provinsi NTB Tahun 2017-2021. *Nusantara Journal of Economics*, 4(2), 68–75.
- Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(2), 163–171.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Hadju, I. I., Masinambow, V. A. J., & Maramis, M. T. B. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 110–120.
- Islami, F. S., & Nugroho, S. B. M. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 29–39.
- Isnaini, A., Sarviah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Tenaga Kerja, Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2015-2021. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 3(3), 601–614.
- Kurniawan, R., & Huda, S. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 3(2), 335–344.
<http://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/121>
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Marwoto, P. B., & Manullang, R. R. (2019). Analisis Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar di Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis*, 6(2), 1–11.
- Meilani, H., & Wuryandani, D. (2012). Pola Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 3(2), 203–214.
- Noviar. (2021). Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24–33.
<https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>
- Patra, I. K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kota Palopo. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 192–201. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i2.64>
- Permana, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 111–129.
- Rajab, A., & Kamarudin, J. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 23(4),

607–613. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
Umiyati, E. (2012). Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma
Ekonomika*, 1(6), 42–50.